

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Khusni Munandar

Abstrak

Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis. Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Dengan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis diketahui bahwa karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek mengkategorikan semua tindak pidana dalam sebagai tindak pidana pelanggaran. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek lebih bersifat ke arah privat daripada sebagai hukum publik, karakter hukum pidana semakin tidak banyak ditonjolkan, diubahnya delik biasa menjadi delik aduan, dikurangnya sanksi pidana penjara dari 7 (tujuh) tahun menjadi maksimal 5 (lima) tahun, diubahnya kategori dari tindak pidana kejahatan menjadi tindak pidana pelanggaran, hingga akhirnya pelaku tindak pidana pemalsuan merek potensial terjadi di mana-mana. b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek menimbulkan nuansa yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama tetapi tidak sama jenis pidana dan sanksi yang diterapkan, bahkan pasalnya berbeda. Kondisi penegakan hukum pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 Tentang merek membawa penafsiran yang berbeda mendekati peminimalisiran penegakan hukum pidana disebabkan karena pengaturan dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, sehingga tidak begitu membawa dampak luas penegakan hukum merek karena pelanggaran dibandingkan penegakan hukum merek karena kejahatan.

Kata kunci : Penegakan, Pidana, Merek

**LAW ENFORCEMENT CRIME ACCORDANCE
TRADEMARKLAW NO. 15 OF 2001
ON MARKS**

Khusni Munandar

Abstract

In the business world producers provide its own image on the mark or the goods and services production of their products are known as a brand. Brand is used to differentiate the product from other products, mainly for the same goods or services and similar. Protection of the rights to the brand for brand holders in Indonesia lately is often found violations of the right to the trademark. The violations occurred since the first until now by using more advanced technology and carried out by people who are not responsible. The research objective of this thesis is to know and understand the characteristics of the crime of trademark counterfeiting is happening and to know and understand the law enforcement and criminal sanctions against the crime of counterfeiting brands. With this type of research is descriptive normative and analytical mind that the characteristics of the crime of trademark counterfeiting that occurred after the enactment of Law No.15 of 2001 regarding Mark categorize all criminal acts in violation as a criminal offense. Law No.15 of 2001 regarding Mark is more towards the private rather than public law, criminal law character more and not much enjoy, transforms ordinary offense becomes a crime on complaint, reduction of the sanction of imprisonment of 7 (seven) years to a maximum of 5 (five) years , transforms the category of criminal acts become criminal act violation, until the criminal counterfeiting potential brand happens everywhere. b. Enforcement of the law against the crime of counterfeiting brand after the enactment of Law No.15 of 2001 regarding Mark generate different shades, create legal uncertainty for those seeking justice, between one decision with another decision in the same case but not the same type of crime and punishment applied, even a different article. Conditions of law enforcement after the enactment of Law No.15 of 2001 About the brand carries a different interpretation of criminal law enforcement approach minimal caused by settings in the Law No.15 of 2001 regarding Mark is categorized as a crime offense, so it is not so sweeping impact law enforcement brand due to violations of law enforcement than the brand because of the crime..

Keywords : Enforcement, Criminal, Brand